



PENURUNAN TARIF TOL DAN TIKET PESAWAT: DAMPAK DAN TANTANGANNYA BAGI BUMN

Rizky Allam Zandriyan Pratama* dan Sulasi Rongiyati**

Abstrak

Peningkatan permintaan transportasi selama mudik Lebaran 2025 mendorong pemerintah menerapkan kebijakan diskon tiket pesawat dan tarif tol untuk meringankan beban masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini, meskipun mendukung pemudik dan perekonomian daerah tujuan, menimbulkan tantangan bagi BUMN. Artikel ini akan menganalisis bagaimana kebijakan ini memengaruhi pendapatan dan bagaimana BUMN dapat beradaptasi dan mengoptimalkan kinerjanya dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah. Optimalisasi kinerja melalui kolaborasi, pemanfaatan teknologi, dan diversifikasi pendapatan menjadi langkah strategis bagi BUMN dalam menghadapi tantangan ini. Komisi VI DPR RI perlu mengawasi dampak kebijakan terhadap keberlanjutan BUMN serta mendorong inovasi dan efisiensi guna memastikan layanan transportasi tetap berkualitas. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan stabilitas keuangan BUMN.

Pendahuluan

Mudik Lebaran, sebuah tradisi tahunan yang mengakar kuat di Indonesia, memicu peningkatan signifikan dalam permintaan terhadap berbagai moda transportasi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergerakan sosial dan budaya yang besar, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang luas, terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam sektor transportasi dan infrastruktur. Setiap tahun, jutaan masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman, sehingga menciptakan tekanan yang besar pada sistem transportasi dan logistik nasional.

Menjelang periode mudik Lebaran 2025, Pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol di beberapa ruas jalan utama. Instruksi ini dikeluarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk perjalanan yang lebih terjangkau, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi selama periode Ramadan dan Lebaran (Firdaus, 2025). Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tujuan mudik.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: rizky.pratama2@dpr.go.id

***) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol yang berlangsung sejak 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 ini, memunculkan pertanyaan penting mengenai dampaknya terhadap kinerja keuangan BUMN seperti Garuda Indonesia dan Jasa Marga. Sebagai penyedia layanan transportasi, BUMN tersebut memiliki peran vital dalam mendukung kelancaran arus mudik. Artikel ini akan menganalisis bagaimana kebijakan penurunan harga ini memengaruhi pendapatan, profitabilitas, dan optimalisasi kinerja BUMN untuk meminimalisasi dampak yang ada.

Dampak Penurunan Harga

Penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol selama periode mudik Lebaran 2025 berdampak terhadap kinerja keuangan BUMN yang terlibat. Dari sisi maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, penurunan harga tiket yang bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan penumpang dapat berpotensi menurunkan pendapatan operasional secara keseluruhan. Berdasarkan laporan keuangan Garuda Indonesia Tahun 2024 pendapatan usaha pada triwulan II mencapai US\$908.752.394. Penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13–14% berpotensi menurunkan pendapatan Garuda hingga US\$127.225.335 (Garuda Indonesia, 2024). Hal ini mendapat perhatian pemerintah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini mengatur tentang insentif PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk tiket pesawat ekonomi domestik pada periode tertentu.

Selain itu, BUMN seperti Injourney Airports dan Pertamina juga melakukan penyesuaian tarif guna mendukung penurunan tarif tiket pesawat tersebut. Injourney Airports selaku operator bandar udara melakukan penurunan tarif jasa kebandarudaraan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar 50% di 37 bandar udara (Catriana & Setiawan, 2025). Pertamina selaku BUMN Migas juga melakukan penyesuaian harga avtur untuk 37 bandar udara nasional. Hal ini disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 11 Maret 2025. Dengan adanya sinergi ini diharapkan dampak negatif terhadap pendapatan BUMN sektor transportasi udara dapat berkurang.

Penurunan tarif juga dilakukan oleh pengelola jalan tol seperti Jasa Marga. Penurunan tarif tol sebesar 20% di beberapa ruas tol utama di Jawa dan Sumatra juga berpotensi menurunkan pendapatan tol. Berdasarkan laporan keuangan Jasa Marga Tahun 2024 pendapatan usaha pada triwulan II mencapai Rp4.454,61 miliar. Penurunan tarif tol sebesar 20% pada mudik lebaran tahun ini, berpotensi mengurangi pendapatan Jasa Marga hingga Rp890,92 miliar (Jasa Marga, 2024). Hal ini dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi kembali dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan tol. Di samping itu juga berpotensi mengakibatkan lonjakan pengguna jalan tol pada mudik lebaran tahun ini. Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan prediksi pemudik selama Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta jiwa, dan dari

data tersebut sekitar 23% atau 33,66 juta akan menggunakan mobil pribadi (Kementerian Perhubungan, 2025). Lonjakan penumpang diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap pendapatan Jasa Marga, tetapi keselamatan dan keamanan pengguna jalan harus tetap menjadi prioritas.

Selain dampak terhadap BUMN, kebijakan diskon transportasi yang diterapkan pemerintah mendapat tanggapan positif dari pengamat Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah tujuan mudik. Menurutnya, potongan harga tiket pesawat dan tol tidak hanya meningkatkan permintaan tiket pesawat, tetapi juga memungkinkan pemudik menghemat biaya perjalanan sehingga mereka dapat membelanjakan lebih banyak uang di kampung halaman. Peningkatan konsumsi di daerah asal pemudik ini berpotensi menggerakkan sektor ekonomi lokal, terutama dalam bidang perdagangan, kuliner, serta industri kreatif yang bergantung pada arus wisatawan musiman. Secara lebih luas, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran arus mudik serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Lebaran. Dengan dukungan pengawasan harga bahan pokok dan pemantauan pemberian THR, diharapkan kebijakan ini dapat menciptakan suasana perayaan yang lebih nyaman dan aman sekaligus menjaga produktivitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Ali, 2025).

Optimalisasi Kinerja BUMN

Dalam menghadapi kebijakan penurunan tarif tol dan tiket pesawat selama periode mudik Lebaran 2025, BUMN perlu melakukan optimalisasi kinerja untuk memastikan pelayanan yang efektif dan efisien. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam konferensi pers di area Terminal 2F Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kolaborasi antar-BUMN dan instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan (Ma'arif, 2025). Koordinasi ini penting untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi angkutan mudik yang lancar, termasuk pengaturan rute yang efisien untuk mengurangi kemacetan dan memastikan keselamatan pemudik.

Optimalisasi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dalam operasionalnya. Penerapan sistem pembayaran otomatis menggunakan teknologi seperti *radio frequency identification* (RFID) dan *license plate recognition* (LPR) di gerbang tol, dapat mengurangi waktu transaksi dan kemacetan. Contoh dari penerapan sistem ini dapat dilihat di Singapura, di mana waktu transaksi di gerbang tol berkurang drastis, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna. Dengan menerapkan teknologi serupa di Indonesia, BUMN dapat mempercepat arus kendaraan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pemudik.

Selain itu inovasi dengan menyediakan layanan lain juga menjadi alternatif solusi dari dampak finansial terhadap BUMN. Sebagai contoh PT KAI Wisata telah berhasil mendukung kegiatan mudik dengan menyediakan layanan transportasi berkelanjutan, melalui divisi MICE (*Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions*). PT KAI Wisata bekerja sama dengan

berbagai perusahaan untuk mengelola perjalanan rombongan selama mudik. Inovasi semacam ini menunjukkan bagaimana BUMN dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai lebih kepada masyarakat selama periode mudik yang padat. Dengan langkah-langkah tersebut, BUMN tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat tetapi juga berkontribusi pada kelancaran arus mudik secara keseluruhan.

Penutup

Berbagai langkah strategis yang diambil dalam kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol selama mudik Lebaran 2025 menunjukkan upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan ini juga memberikan tantangan bagi BUMN di sektor transportasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah pengguna layanan dengan keberlanjutan finansial perusahaan. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja melalui kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta diversifikasi sumber pendapatan menjadi kunci bagi BUMN untuk tetap berkontribusi dalam kelancaran arus mudik tanpa mengorbankan stabilitas keuangannya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan BUMN yang bergerak di sektor transportasi. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta efektivitas insentif yang diberikan pemerintah harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga dapat mendorong kebijakan yang mendukung inovasi dan diversifikasi usaha BUMN agar tetap kompetitif dan mampu menghadapi dinamika pasar ke depan.

Referensi

- Ali, M. (2025, Maret 2). Musim mudik Lebaran 2025, Prabowo bakal turunkan harga tiket pesawat selama 2 minggu, *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/islami/read/5940216/musim-mudik-lebaran-2025-prabowo-bakal-turunkan-harga-tiket-pesawat-selama-2-minggu>
- Catriana, E., & Setiawan, S. R. D. (2025, Maret 3). Lebaran 2025, Injourney Airports turunkan tarif kebandarudaraan. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/03/03/120303726/lebaran-2025-injourney-airports-turunkan-tarif-jasa-kebandarudaraan>
- Firdaus A. (2025, Februari 28). Prabowo instruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4680569/prabowo-instruksikan-penurunan-tarif-tol-dan-harga-tiket-pesawat>
- Garuda Indonesia. (2024, Juli 30). *Laporan keuangan triwulan Garuda Indonesia*. <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/financial-report-and-presentations/financial-report/index>
- Hardi, A. T. (2025, Maret 9). Pakar UGM: Diskon tarif pesawat dan tol mengurangi beban masyarakat saat mudik. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/750423/pakar-ugm-diskon-tarif-pesawat-dan-tol-mengurangi-beban-masyarakat-saat-mudik>

- Jasa Marga. (2024, Juli 31). *Laporan keuangan triwulan Jasa Marga*. <https://investor-id.jasamarga.com/financials.html>
- Kementerian Keuangan. (2025, Maret 3). *Pemerintah berikan insentif PPN 6% untuk tiket pesawat ekonomi selama mudik Lebaran 2025*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Insentif-PPN-Tiket-Pesawat-Lebaran-2025>
- Kementerian Perhubungan. (2025, Maret 14). *Survei potensi pergerakan masyarakat angkutan Lebaran 2025, Menhub Dudy: Potensi pergerakan capai 146,48 juta orang, puncak arus mudik 28 Maret 2025*. Berita Umum. <https://dephub.go.id/post/read/survei-potensi-pergerakan-masyarakat-angkutan-lebaran-2025,-menhub-dudy-potensi-pergerakan-capai-146,48-juta-orang,-puncak-arus-mudik-28-maret-2025>
- Ma'arif. A. S. (2025, Maret 1). *Pemerintah turunkan harga tiket pesawat hingga tarif tol mudik lebaran*. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4682197/pemerintah-turunkan-harga-tiket-pesawat-hingga-tarif-tol-mudik-lebaran>
- *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025*. (2025).
- Wisnubroto. K. (2025, Maret 9). *Merayakan Idulfitri tenang dan menyenangkan dengan tiket pesawat murah*. *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9058/merayakan-idulfitri-tenang-dan-menyenangkan-dengan-tiket-pesawat-murah?lang=1>